

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN DAN
DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)

(Skripsi)

Oleh

IRHAM MAULANA TSALITS



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFECT OF BALANCING FUNDS AND SPECIAL AUTONOMIC FUNDS RECEIPT ON ECONOMIC GROWTH WITH CAPITAL EXPENDITURE AS INTERVENING VARIABLE

(Empirical Study of District/City Government in Aceh Province)

By

IRHAM MAULANA TSALITS

BPS Aceh in its data publication describes the economic condition of Aceh experiencing instability since 2011 and peaked in 2015 where Aceh's economic growth showed negative value. On the other hand, the transfer funds from the Central Government in the form of Balancing Funds and Special Autonomy Funds received by Aceh increased in number each year which should be a stimulus for regional economic progress and increase the level of people's purchasing power.

The aim of the research is to analyse the influence of balancing funds and special autonomy funds receipt on economic growth with capital expenditure as intervening variable. In addition, it also seen its influence in the next 1 and 2 years. The population in this study are the Districts / Cities government in Aceh as many as 23 districts/cities. The data used are secondary data with time series for 5 years (2011-2015). Data were analyzed using E views version 8.0.

The results show that the balancing funds have a significant and positive impact on economic growth in the same year but did not significantly affect economic growth in the next one or two years. The special autonomy fund did not significantly affect the economic growth in Aceh in the current year or the year after, but only had a significant positive effect two years later. And, capital expenditure does not mediate the relationship between balancing funds and special autonomy funds receipt with economic growth.

Key Words : *Balancing Fund, Special Autonomy Fund, Capital Expenditure, Economic Growth*

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)

Oleh

IRHAM MAULANA TSALITS

BPS Aceh dalam publikasi datanya menggambarkan kondisi ekonomi Aceh yang mengalami ketidakstabilan sejak tahun 2011 dan puncaknya di tahun 2015 dimana pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan nilai negatif. Di sisi lain, dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Otsus yang diterima Aceh jumlahnya meningkat setiap tahunnya yang seharusnya dapat menjadi stimulus bagi kemajuan ekonomi daerah dan menambah tingkat daya beli masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh penerimaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan belanja modal sebagai variabel intervening. Selain itu juga dilihat pengaruhnya di 1 dan 2 tahun berikutnya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu selama 5 tahun (2011-2015). Data dianalisis dengan menggunakan program *E views* versi 8.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di satu dan dua tahun berikutnya. Dana otsus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh pada tahun yang bersangkutan ataupun satu tahun setelahnya, namun baru memiliki pengaruh signifikan positif dua tahun setelahnya. Dan, belanja modal tidak memediasi hubungan antara penerimaan dana perimbangan dan dana otsus dengan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN DAN
DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)

Oleh

IRHAM MAULANA TSALITS

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN
DANA PERIMBANGAN DAN DANA
OTONOMI KHUSUS TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI ACEH)**

Nama Mahasiswa

: Irham Maulana Tsalits

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1511031139

Program Studi

: Akuntansi

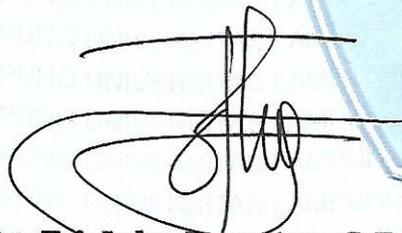
Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



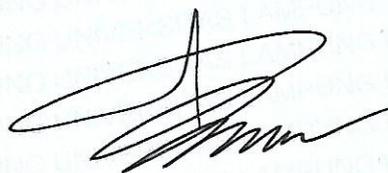
Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620428 200003 1 001



Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA.
NIP 19830830 200604 2 001

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi

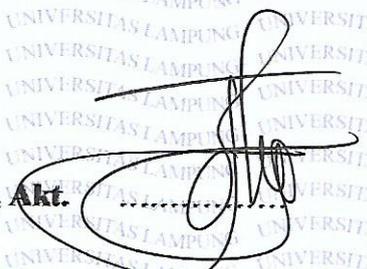


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

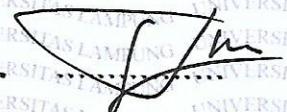
MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Dr. Trijoko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA.



Penguji Utama : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CPA.



2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



Prof. Dr. Hi Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Agustus 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Maulana Tsalits

NPM : 1511031139

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



Bandar Lampung, 15 Agustus 2017

Irham Maulana Tsalits

NPM 1511031139

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1987, anak ketiga dari tujuh bersaudara. Mengalir darah suku Jawa karena kedua orang tua berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Masa Sekolah Dasar dihabiskan di Jakarta dari tahun 1993 sampai 1999, tepatnya di SDN Sumur Batu 06 Pagi. Jenjang SMP, penulis tempuh di Pondok Pesantren Terpadu Nurul Amanah di Desa Rancak, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1999 - 2002. Sementara masa SMA dihabiskan di Kabupaten Sukabumi yaitu di SMA Pesantren Unggul Al Bayan, Cibadak Sukabumi tahun 2002 - 2005.

Lulus SMA, penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2005 Program Diploma III Jurusan Akuntansi Pemerintahan. Lulus dari STAN tahun 2008, dan tahun 2009 penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan ditugaskan pertama kali di Perwakilan BPKP Provinsi Aceh. Saat bertugas di Aceh, penulis menikah dengan seorang inong Aceh pada Februari 2013 dan telah dikaruniai 2 putri hingga saat ini (2017). Setelah lebih kurang 6 tahun di bumi Nanggroe, di tahun 2015, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Lampung dari jalur program STAR-BPKP dengan target waktu kelulusan di tahun 2017 ini.

MOTTO

“Kuntum khoiro ummah – Kalian adalah sebaik-baik ummat”

(Q.S. Ali Imron : 110)

- Berikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, kapanpun, dimanapun,
karena Anda adalah sebaik-baik ummat -

- Bersegera dan jangan tunda untuk urusan kebaikan -

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- Istriku tercinta Susi Yanti, bidadari dunia yang Allah tetapkan menjadi ibu dari anak-anakku.
- Dua putriku tersayang Faiha Shabira Sakhiy dan Huriyah Tsania Khurmi, semoga kelak besar menjadi wanita muslimah yang solihah secara *kaaffah*.
- Ummii dan Abii di Jakarta juga Ummi dan Bapak di Aceh terima kasih untuk support dan doanya selama ini.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, *Rabb* Semesta Alam pencipta langit dan bumi, yang Maha Berkehendak atas segala sesuatu, yang dengan berbagai nikmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Di lembar kertas yang putih bersih ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Wa bil khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Trijoko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, bimbingan, saran, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, dan masukan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Penguji utama yang telah memberikan masukan, nasihat dan saran-saran yang membangun serta diskusi yang bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D. selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar dengan baik.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Ibu Agustina Awan dan Bapak Noveriadi juga seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas semua bantuannya.

10. Ummi dan Abii di Jakarta dan Ummi di Aceh, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga Allah melimpahkan keberkahan umur dan kekhusyuan dalam ibadah.
11. Istriku tercinta Susi Yanti, terima kasih untuk pengorbanan dan kesabaran yang diberikan, semoga istiqomah menjadi istri yang solihah sehingga kelak di surga kita bersama dengan izin Allah. Amiiinn
12. Dua putriku tercinta dan tersayang, Faiha Shabira Sakhyy dan Huriyah Tsania Khurmi, terima kasih telah menjadi penyemangat dan pelipur lara dikala sedih pusing dan gundah gulana dalam mengarungi proses hidup ini. Semoga kelak kalian tumbuh besar menjadi wanita-wanita muslimah yang solihah secara kaaffah sukses dan bahagia dunia dan akhirat.
13. Abang, kakak, dan adik-adik baik yang di Jakarta, di Aceh dan dimanapun berada, terima kasih untuk support dan doanya, semoga Allah berikan keberkahan dan kebahagiaan hidup untuk antum semua.
14. Teman-teman STAR-BPKP Batch 2 Unila. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Semoga antum semua sukses baik di karir pekerjaan juga dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah di masa depan.
15. Seluruh teman, kerabat, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, *jazaakumullah khairan katsiiran khairul jazaa'*, semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah *Subhaanahu Wata'ala*. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2017
Penulis,

Irham Maulana Tsalits

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori <i>Fiscal Federalism</i>	9
2.1.2 Teori Desentralisasi	10
2.1.3 Keuangan Daerah	12
2.1.4 Dana Perimbangan.....	14
2.1.5 Dana Otonomi Khusus	16
2.1.6 Belanja Modal	17
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran	24
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Jenis dan Sumber Data	31

3.3	Populasi dan Sampel.....	32
3.4	Model Penelitian.....	33
3.5	Definisi Operasional dan Operasional Variabel	35
	3.5.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)	35
	3.5.2 Variabel Independen (Variabel Bebas).....	36
	3.5.3 Variabel Intervening (Mediasi)	37
3.6	Pengolahan Data	37
	3.6.1 Pendekatan Model Regresi Data Panel.....	38
	3.6.2 Pemilihan Model	40
3.7	Analisis Data	42
	3.7.1 Analisis Deskriptif	43
	3.7.2 Uji Asumsi Klasik	43
3.8	Analisis Regresi (Uji Hipotesis)	46
	3.8.1 Uji Statistika F – Simultan	47
	3.8.2 Uji Statistika t – Parsial	47
	3.8.3 Uji Variabel Mediasi	48
	3.8.4 Koefisien Determinasi	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Statistik Deskriptif.....	50
4.2	Pemilihan Model	51
	4.2.1 Substruktur I	51
	4.2.2 Substruktur II (tanpa <i>lag</i>)	53
	4.2.3 Substruktur II (dengan <i>lag</i> 1 tahun)	55
	4.2.4 Substruktur II (dengan <i>lag</i> 2 tahun)	57
4.3	Uji Asumsi Klasik	60
4.4	Analisis Hasil Regresi Data Panel.....	60
4.5	Uji Variabel Mediasi	66
4.6	Pembahasan	69

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	76
5.2	Implikasi	77
5.3	Keterbatasan Penelitian	79
5.4	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	22
4.1 Statistik Deskriptif	50
4.2 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> untuk Substruktur I	52
4.3 Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i> untuk Substruktur I	53
4.4 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> untuk Substruktur II	53
4.5 Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i> untuk Substruktur II	54
4.6 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier (LM)</i> untuk Substruktur II (tanpa <i>lag</i>) ...	55
4.7 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> Substruktur II (<i>lag</i> 1 tahun)	55
4.8 Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i> untuk Substruktur II (<i>lag</i> 1 tahun)	56
4.9 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier (LM)</i> Substruktur II (<i>lag</i> 1 tahun)	57
4.10 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> Substruktur II <i>lag</i> 2 tahun	57
4.11 Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i> untuk Substruktur II (<i>lag</i> 2 tahun)	58
4.12 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier (LM)</i> Substruktur II (<i>lag</i> 2 tahun)	59
4.13 Rangkuman Model Pengolahan Terpilih	59
4.14 <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi Substruktur I	61
4.15 <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi Substruktur II (tanpa <i>lag</i>)	62
4.16 <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi Substruktur II (<i>lag</i> 1 tahun)	64
4.17 <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi Substruktur II (<i>lag</i> 2 tahun)	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Grafik Pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2011-2016.....	2
1.2 Grafik Alokasi Dana Otsus Aceh Tahun 2008-2015.....	3
1.3 Grafik Persentase Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2010-2016.....	5
2.1 Kerangka Pemikiran	24
3.1 Pengujian Pemilihan Model Pengolahan Data Panel.....	40
4.1 Pengaruh mediasi BM antara DPK dengan PE.....	67
4.2 Pengaruh mediasi BM antara DOK dengan PE.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2015
- Lampiran 2 Data Persentase Realisasi Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2015
- Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik Substruktur I

BAB I

PENDAHULUAN

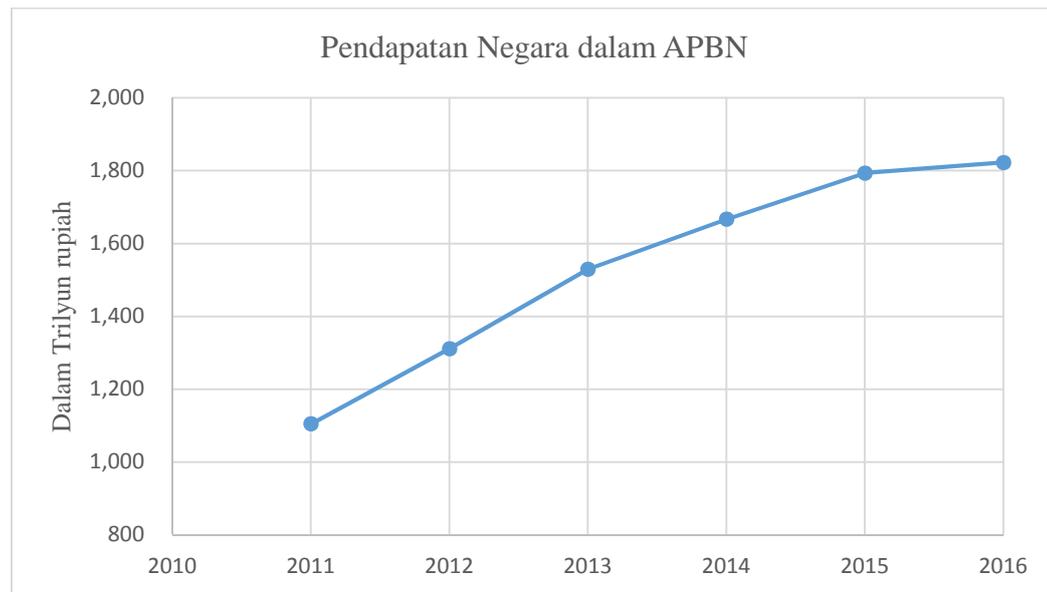
1.1 Latar Belakang

Terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan pemberlakuan otonomi daerah bagi seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, tak terkecuali Aceh. Lebih dari itu, Aceh juga ditetapkan sebagai daerah dengan otonomi khusus dengan diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sumber keuangan yang menjadi penopang daerah Aceh dalam menjalankan pemerintahannya selaku daerah otonom adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat. Transfer (dari Pusat) ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian (PMK Nomor 06/PMK.07/2012).

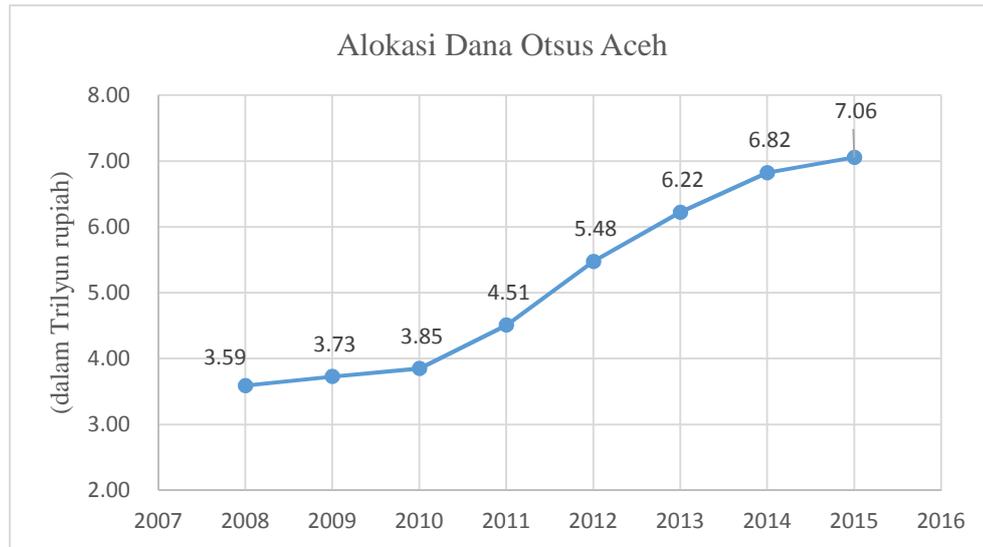
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya karena menyesuaikan dengan penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN yang juga selalu meningkat. Pendapatan negara dalam

APBN 2011 sebesar 1.104,9 Trilyun dan di tahun 2016, APBN-P sudah mencapai 1.761,6 Trilyun. Dengan pendapatan negara dalam APBN yang selalu meningkat tersebut secara otomatis akan meningkatkan jumlah dana perimbangan yang dialokasikan ke pemerintah daerah.



Gambar 1.1
Grafik Pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2011 – 2016
Sumber : BPS (data diolah)

Selain Dana Perimbangan, provinsi Aceh juga mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung Daerah Otonomi Khusus Aceh sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dana Otsus ini mulai diterima pada tahun 2008 dan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Sejak pertama kali menerima alokasi dana otsus tahun 2008, hingga tahun 2015, total dana otsus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk provinsi Aceh mencapai 41,2 Triliun.



Gambar 1.2
 Grafik Alokasi Dana Otsus Aceh Tahun 2008 – 2015
 Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

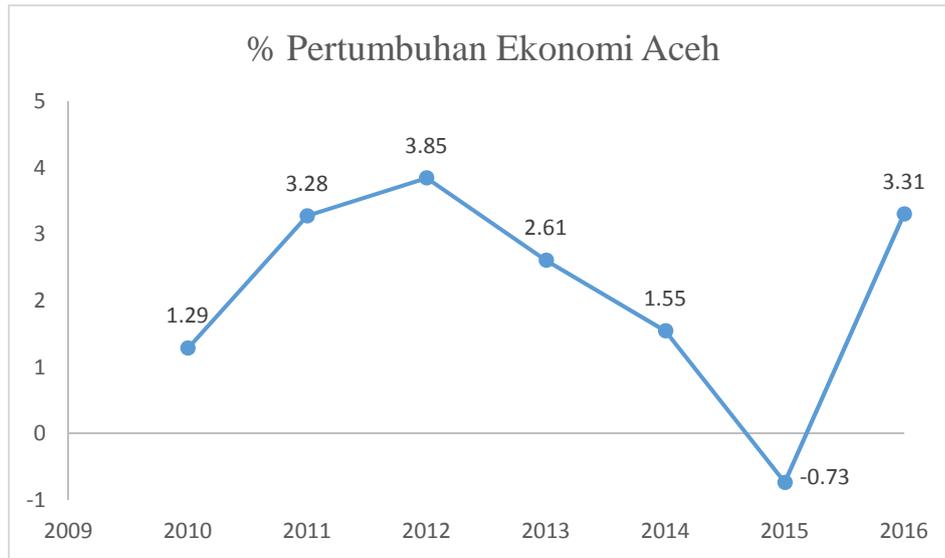
Peningkatan jumlah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota di Aceh setiap tahunnya dari pemerintah pusat ditambah dana otsus yang diterima dengan jumlah yang tidak sedikit akan berdampak pada peningkatan belanja infrastruktur atau belanja modal. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, dana otsus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Sehubungan dengan banyaknya dana yang diterima oleh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan telah dianggarkan dalam belanja modal untuk pengadaan infrastruktur publik membuktikan bahwa *theory of grants* memberikan landasan bahwa bantuan pemerintah (yang dalam praktiknya di Indonesia dapat berbentuk transfer dana) menjadi stimulus bagi kemajuan ekonomi daerah dan menambah tingkat daya beli masyarakat (Hartati, dkk, 2016). Tambahan kemampuan ini pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dapat dilihat dari penelitian Hong dan Ahmed (2009) terhadap 14 negara bagian di India yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah melalui belanja publik seperti untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (belanja modal) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Adi (2006) dengan sampel Kabupaten/Kota se Jawa dan Bali yang menyimpulkan bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah data-data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh juga Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) yang menggambarkan ketidakstabilan ekonomi Aceh sejak 2011 dan puncaknya 2015 dimana pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan nilai negatif.



Gambar 1.3
 Grafik Persentase Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2010-2016
 Sumber : BPS (data diolah)

Berdasarkan analisis *Growth Diagnostic* yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, secara umum terdapat 4 hambatan utama terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif antara lain minimnya kegiatan ekonomi produktif berupa keberadaan berbagai industri pengolahan di Aceh, kondisi infrastruktur di Aceh, khususnya kondisi pelabuhan, listrik, serta jalur konektivitas yang menghubungkan secara langsung antara kawasan Aceh bagian barat dan bagian timur melalui jalur bagian tengah, kualitas sumber daya manusia dan kenyamanan dalam berinvestasi yakni terkait dengan banyaknya biaya tidak resmi berbentuk pungutan liar (Pungli). Seharusnya, dengan jumlah anggaran yang diterima oleh kabupaten/kota di Aceh yang terus meningkat setiap tahunnya terutama dengan adanya dukungan alokasi dana otsus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pengelolaan dana daerah secara optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat terlihat adanya kondisi yang tidak

saling berkesesuaian yaitu fenomena pertumbuhan ekonomi Aceh yang sangat tidak stabil selama tahun 2011-2015 sementara disisi lainnya dana perimbangan dan dana otsus yang diterima/dialokasikan untuk provinsi Aceh selalu meningkat setiap tahunnya, dan hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti. Judul penelitian yang diambil yaitu **“Pengaruh Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening”** dengan studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2011-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dana perimbangan dan dana otsus berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
2. Apakah dana perimbangan, dan dana otsus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
4. Apakah belanja modal memediasi pengaruh dana perimbangan dan dana otsus terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan bahwa dana perimbangan dan dana otsus berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk membuktikan bahwa dana perimbangan, dan dana otsus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
4. Untuk membuktikan bahwa dana perimbangan dan dana otsus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjelaskan dan mendukung teori-teori yang sudah ada antara lain *fiscal federalism theory*, dan teori desentralisasi terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi di Aceh yang dikaitkan dengan besarnya dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat melalui pengalokasian belanja modal.

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan dengan pengaruh dana perimbangan, dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai bahan referensi serta data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada

bidang kajian ini.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan informasi bagi pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh tentang pengaruh penerimaan dana perimbangan dan dana otsus terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan daerah dalam penganggaran belanja modal dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di Aceh secara efektif.

BAB II

RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Fiscal Federalism*

“The traditional theory of fiscal federalism lays out a general normative framework for the assignment of functions to different levels of government and the appropriate fiscal instruments for carrying out these functions (Richard Musgrave dalam Oates, 1999).” Teori *Fiscal Federalism* menjabarkan kerangka umum terkait tugas dan fungsi berbagai tingkat di pemerintahan dan menjelaskan instrumen-instrumen fiskal apa yang tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Teori *Fiscal Federalism* merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959) dan Oates (1972). Teori ini menekankan pertumbuhan ekonomi dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah. Teori *fiscal federalism* terbagi atas dua perspektif teori yakni menurut *traditional theories (first generation theory)* dan *new perspective theories (second generation theories)*.

Traditional theories (first generation theory) dikemukakan oleh Hayek (1945)

yang menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi. Dari pandangan ini terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi. Pertama, tentang penggunaan *knowledge in society* mengenai proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Kedua, memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat.

Sementara *new perspective theories (second generation theories)*, dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) lebih menekankan pada bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi (Dwirandra dan Wertianti, 2013).

2.1.2 Teori Desentralisasi

Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi yaitu:

“Decentralization can be defined as the transfer of responsibility for planning, management and resource raising and allocation from the central government and its agencies to: (a) field units of central government ministries or agencies, (b) subordinate units or levels of government, (c) semiautonomous public authorities or corporations, (d) areawide, regional or functional authorities, or (e) nongovernmental private or voluntary organizations (Rondinelli 1981a)”

Oates (1972) dalam Haryanto dan Astuti (2009) menjabarkan pengertian desentralisasi fiskal sebagai derajat kebebasan dalam membuat keputusan

mengenai pembagian pelayanan publik dalam berbagai tingkat pemerintahan.

Davoodi dan Zou (1998) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal, atau devolusi kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dipandang sebagai bagian dari paket reformasi untuk meningkatkan efisiensi di sektor publik, untuk meningkatkan persaingan di antara pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, dan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Argumen dasar dalam mendukung desentralisasi fiskal didasarkan pada dua asumsi yang saling melengkapi: (1) desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan publik sebagai hasil dari informasi yang dimiliki; dan (2) mobilitas penduduk dan persaingan di antara pemerintah daerah untuk pelayanan publik akan mendorong terjadinya kecocokan antara preferensi masyarakat lokal dengan pemerintah daerah (Davoodi dan Zou, 1998).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan pelayanan publik, mengingat fungsinya sebagai suatu alat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam penerapan desentralisasi ini, pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan sumber keuangan kepada pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan

menjadi komponen pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Pemberian sumber keuangan negara berdasarkan PMK Nomor 06/PMK.07/2012 diistilahkan dengan dana Transfer ke Daerah yaitu bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

2.1.3 Keuangan Daerah

Definisi keuangan Daerah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Disisi lain, keuangan daerah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan Negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ditujukan untuk pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

PP 58 tahun 2005 Pasal 1 ayat 6 mengartikan pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Nordiawan (2008) menjelaskan tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas.
- b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan.
- c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah termasuk didalamnya yaitu Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus.

Sementara belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan lain-lain.

2.1.4 Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Ma (1997) menjelaskan tiga alasan untuk melakukan transfer antar pemerintah dilihat dari sudut pandang ekonomi yaitu:

1. Terdapat ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalances*) yang terjadi karena pemerintah pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai pengeluarannya;
2. Adanya ketidakseimbangan fiskal horisontal (*horizontal fiscal imbalances*)

yaitu perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah;

3. Adanya efek pelimpahan antar daerah (*spill-over effect*) yaitu eksternalitas ekonomis dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah kepada daerah lainnya.

Dalam pasal 10 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada aspek hubungan pemerintahan pusat dan daerah, Elmi dalam Julitawati (2012) mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan dana perimbangan ini diharapkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

2.1.5 Dana Otonomi Khusus

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang aktif, responsif, dan aspiratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, pemerintah pusat menerapkan hak Otonomi khusus (selanjutnya disebut Otsus) di Aceh pada tahun 2001 yang diwujudkan melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh. Diberikannya Otsus kepada Provinsi Aceh karena kekhasan karakter yang dimiliki masyarakat Aceh, selain itu juga sebagai wujud penghargaan negara terhadap dedikasi dan perjuangan yang luar biasa dari Aceh selama perang kemerdekaan, dan diharapkan pemberian Otsus ini juga dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang ada di internal Aceh.

Pemerintah selain memberikan otonomi khusus untuk Aceh juga mengalokasikan dana otsus untuk mendukung Daerah Otonomi Khusus Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dana Otsus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dana otsus ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon dana alokasi umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon dana alokasi umum Nasional.

Dana otsus pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Pemberian pelayanan kepada masyarakat

akan berjalan secara efektif dan efisien, apabila proses pelayanan tersebut didekatkan kepada masyarakat dan bukan dijauhkan (Hartati dkk, 2016).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa dana otsus merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dalam rangka perwujudan pelaksanaan otonomi khusus serta sebagai salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Aceh.

2.1.6 Belanja Modal

Permendagri 13 Tahun 2006 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik (Arsa, 2015). Setiap tahun pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal untuk pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya: pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pembelian mobil ambulan untuk umum dan lain-lain. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur misalnya: pembangunan gedung pemerintahan, pembelian mobil dinas dan lain-lain. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas mengklasifikasikan belanja modal dalam enam kelompok yaitu:

1. Belanja tanah;
2. Belanja peralatan dan mesin;
3. Belanja gedung dan bangunan;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya;
6. Belanja aset lainnya.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena tingginya rasio belanja modal dalam APBD menjadi indikator besar kecilnya investasi daerah. Investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah selanjutnya akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Arsa, 2015).

Belanja modal pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Rasio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di

daerah tersebut (BPS, 2015).

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik (Arsa, 2015). Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Arsyad (1999) dalam Setyawati dan Hamzah (2007) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Salah satu konsep pertumbuhan ekonomi yaitu model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, mencetuskan konsep pertumbuhan berimbang (atau eksponensial) yang mencakup penjelasan tentang tingkat pertumbuhan alamiah jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menjelaskan peranan akumulasi modal dalam proses pertumbuhan (perkembangan) ekonomi yang terus menerus, yaitu di satu pihak investasi menghasilkan pendapatan dan di lain pihak investasi akan menambah kapasitas produksi perekonomian (Adisasmita, 2008). Tingkat pembangunan ekonomi (*rate of development*) ditentukan oleh hubungan antara pembentukan

modal (*capital formation*), laju pertumbuhan penduduk (*rate of population growth*), dan rasio modal-output (COR) (Adisasmita, 2008).

Konsep pertumbuhan ekonomi lainnya yaitu model pertumbuhan Rostow. Analisis Rostow berdasarkan pada analisis ekonomi dan analisis non-ekonomi yang menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi. Menurut Rostow, unsur-unsur pertumbuhan ekonomi di suatu negara terdiri atas (Adisasmita, 2008):

1. Sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, penduduk, disiplin, motivasi, dan lainnya);
2. Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, iklim, dan lainnya);
3. Pembentukan modal (mesin-mesin, pabrik, jalan raya, dan lainnya);
4. Tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen, kewirausahaan, dan lainnya).

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu,

PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit) dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian mengenai pengaruh Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang telah peneliti ringkas, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK dan DBH Variabel Dependen: Belanja Modal	Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2.	Laimeheriwa (2013)	Analisis pengaruh penerimaan dana Otonomi Khusus, DAU terhadap belanja modal dan IPM (Studi pada kota dan kabupaten di Provinsi Papua)	Variabel Independen: Dana Otsus, DAU Variabel Dependen: Belanja Modal, IPM	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal namun dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
3.	Hartati, dkk (2016)	Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh	Variabel Independen: Dana Otonomi Khusus, TDBH Migas Variabel Dependen: Belanja modal, IPM	Dana otsus dan TDBH Migas berpengaruh positif baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota di Aceh.
4.	Taaha, dkk (2010)	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah	Variabel Independen: Dana Perimbangan Variabel Dependen: Investasi swasta, pertumbuhan ekonomi	Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

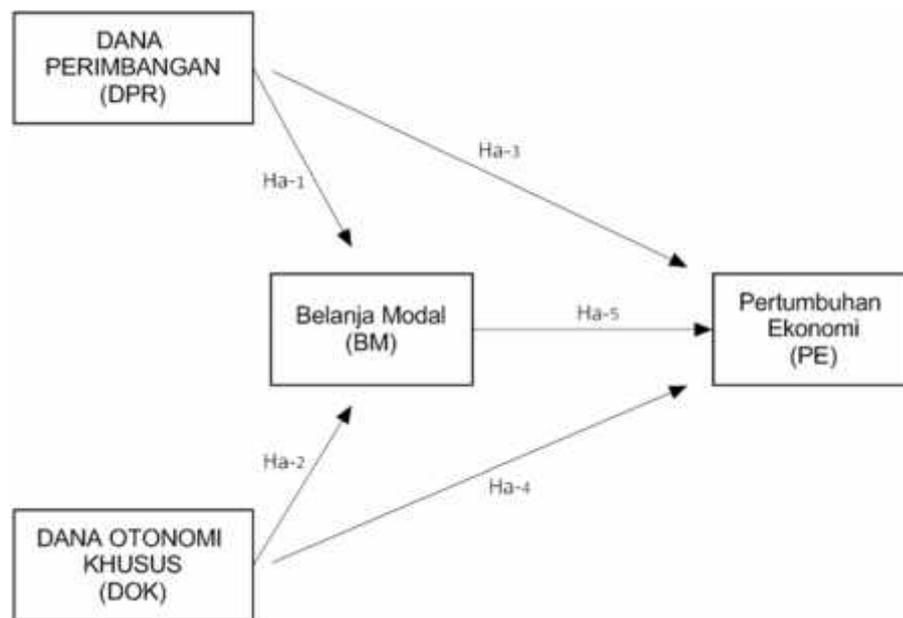
No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Kesimpulan
5.	Budi Santosa (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia	Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan, Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan kemiskinan	PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. DAK dan DBH memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
6.	Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah (2007)	Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK, Belanja Pembangunan, Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran	PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Anasmen (2009)	Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat : 2000-2006	Variabel Independen: Belanja modal, Investasi swasta, jumlah penduduk Variabel Dependen: PDRB	Belanja Modal Pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Investasi Swasta signifikan mempengaruhi PDRB. Jumlah Penduduk juga signifikan mempengaruhi Pertumbuhan PDRB

Sumber : <https://scholar.google.co.id>

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Dana perimbangan merupakan bagian dari dana Transfer Pusat ke Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi fiskal ini membuat pihak pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk mengatur keuangannya secara mandiri. Pengelolaan keuangan secara mandiri ini akan memberikan peluang bagi pihak pemerintah daerah untuk memperbaiki segala bentuk infrastruktur daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan belanja modal dalam anggaran daerahnya. Tiap-tiap daerah memiliki proporsi pengalokasian belanja modal yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.

Hal di atas sesuai dengan Teori *Fiscal Federalism* yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri dimana pemberian dana perimbangan kepada daerah merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal. Dan, sesuai dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh Harrod–Domar yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi (*rate of development*) ditentukan salah satunya oleh pembentukan modal (*capital formation*) yang dapat berupa mesin-mesin, pabrik, jalan raya, dan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Laimeheriwa (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara Wandira (2013) menemukan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_{A-1} : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

2.4.2 Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada suatu provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat di wilayah tersebut. Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh mendapatkan alokasi dana untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi khusus berupa dana otsus. Dana otsus tersebut ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Fasilitas yang terkait dengan infrastruktur, ekonomi rakyat, pendidikan, sosial, dan kesehatan disediakan melalui pengalokasian belanja modal dalam anggaran daerah. Penelitian Hartati, dkk (2016) dan Nabila (2015) menyimpulkan bahwa dana otsus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Laimeheriwa (2013) dan Annisa (2015) terhadap Kabupaten/Kota di Papua menunjukkan hasil yang berlawanan dimana dana otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_{A-2} : Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di provinsi Aceh

Dana perimbangan merupakan bagian dari dana Transfer Pusat ke Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi fiskal ini membuat pihak pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya secara mandiri. Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH yang dikelola secara tepat akan mampu menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena dengan dana transfer dari pusat ini akan menambah tingkat daya beli masyarakat disebabkan perputaran kegiatan perekonomian yang makin tinggi sebanding dengan jumlah dana transfer yang diterima.

Debnath, dkk (2013) menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memengaruhi kesejahteraan wilayah tersebut. Taaha, dkk (2010) dan Hendriwiyanto (2014) menyimpulkan bahwa Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berlawanan didapatkan dari penelitian Iskandar (2012) dimana dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_{A-3} : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

2.4.4 Pengaruh Dana Otsus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di provinsi Aceh

Otonomi khusus diperuntukkan bagi daerah yang diberi kewenangan khusus oleh pemerintah pusat untuk bertanggung jawab atas daerahnya. UU Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan mulai diberikan sejak tahun 2008. Dana otonomi khusus yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan agar membantu pemerintah daerah dalam program kegiatan pembelanjaan daerah.

Sama halnya dengan dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pusat, dana otsus ini juga akan menambah tingkat daya beli masyarakat disebabkan perputaran kegiatan perekonomian yang makin tinggi sebanding dengan jumlah dana transfer yang diterima. Tujuan diberikannya dana otsus diantaranya yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika dana otsus ini dikelola dengan baik maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana penelitian Munnell (1992) yang menyatakan, *“For the evidence suggests that, in addition to providing immediate economic stimulus, public infrastructure investment has a significant, positive effect on output and growth.”* Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_{A-4}: Dana Otsus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

2.4.5 Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi menurut Rostow menjelaskan bahwa salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, pabrik, jalan raya, dan sarana infrastruktur lainnya.

Penelitian Gunalp dan Gur (2002) terhadap 34 negara berkembang menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah yang ditunjukkan dengan total belanja pemerintah berpengaruh positif dan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan

penelitian Munnell (1992) yang menyatakan bahwa belanja investasi untuk infrastruktur publik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Iskandar (2012) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_{A-5}: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

2.4.6 Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otsus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk periode di masa yang akan datang. Sumber penerimaan daerah antara lain diperoleh dari Pendapatan asli daerah, transfer dari pusat dan dari pembiayaan. Dana-dana yang dimiliki oleh daerah tersebut dianggarkan dan direalisasikan melalui program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dilakukan melalui pembelanjaan daerah.

Pengelolaan keuangan secara mandiri tersebut akan memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan belanja-belanja daerah yang difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan dapat mensejahterakan rakyat. Sebagaimana penelitian Hong dan Ahmed (2009) terhadap 14 negara bagian di India yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah melalui belanja publik seperti untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (belanja modal) berpengaruh secara signifikan dan

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_{A-6} : Dana Perimbangan dan dana otsus secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan cara mengukur variabel yang berupa angka-angka dan melalui analisis data dengan prosedur ketentuan statistik. Dalam penelitian ini nantinya menjelaskan seberapa besar pengaruh dana perimbangan dan dana otsus terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*. Data *cross section* yang digunakan adalah data 23 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, sementara data *time series* yaitu rentang waktu data yang diteliti antara tahun 2011 - 2015. Data yang dimaksud diatas meliputi data tingkat pertumbuhan ekonomi, data terkait dana

perimbangan, dan dana otsus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Rentang sampel tahun penelitian diambil berdasarkan fenomena yang terjadi dimana pertumbuhan ekonomi Aceh bergejolak dengan sangat tidak stabil sejak 2011 dan puncaknya di 2015 dengan pertumbuhan ekonomi di level negatif. Selain itu juga karena data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Aceh tahun 2016 belum dipublish oleh BPS saat penelitian berlangsung.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari laman resmi BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh, LHP BPK RI, situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id) dan literatur lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang berjumlah 23 kabupaten/kota, terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota (Rincian Kabupaten/Kota pada Lampiran 1). Penelitian ini memiliki rentang waktu 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2011-2015. Dengan demikian jumlah amatan yang diteliti berjumlah 23 kabupaten/kota x 5 tahun = 115 populasi. Dalam penelitian ini penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2012).

3.4 Model Penelitian

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi, yaitu metode yang berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel dependen, pada satu atau lebih variabel lain, variabel independen atau *explanatory variables*, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (*mean*) atau rata-rata (populasi) variabel dependen, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) berupa variabel independen (Gujarati, 1978). Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu dengan model regresi data panel.

Penelitian ini mengambil pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Variabel independennya yaitu dana perimbangan dan dana otsus, sementara belanja modal sebagai variabel intervening (mediasi). Adapun model umumnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Substruktur I : } \quad \text{BM}_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 \text{DPR}_{i,t} + \beta_2 \text{DOK}_{i,t} + \epsilon_1$$

$$\text{Substruktur II : } \quad \text{PE}_{i,t} = \alpha_2 + \beta_3 \text{DPR}_{i,t} + \beta_4 \text{DOK}_{i,t} + \beta_5 \text{BM}_{i,t} + \epsilon_2$$

Dimana :

$\text{PE}_{i,t}$ = Tingkat PDRB riil pada kabupaten/kota i dan tahun t

$\text{DPR}_{i,t}$ = dana perimbangan pada kabupaten/kota i dan tahun t

$\text{DOK}_{i,t}$ = dana otsus pada kabupaten/kota i dan tahun t

$\text{BM}_{i,t}$ = belanja modal pada kabupaten/kota i dan tahun t

α_1, α_2 = konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien regresi

ϵ_1, ϵ_2 = *error term*

Untuk substruktur II, analisis juga dilakukan dengan menggunakan kelambanan satu tahun (t-1) dan dua tahun (t-2) pada variabel belanja modal. Hal ini dilandasi oleh permasalahan penyerapan anggaran yang kurang optimal dimana yang terjadi adalah penyerapan yang selalu rendah di awal tahun dan akhirnya menumpuk di akhir tahun. Kondisi penyerapan anggaran di Indonesia tersebut diistilahkan oleh Bank Dunia yaitu lambat pada awal sampai tengah tahun anggaran namun meningkat tajam memasuki akhir tahun (*slow back-loaded*) (BPKP, 2011). Selain itu, proyek pemerintah juga adakalanya melebihi jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi satu atau dua tahun berikutnya.

Lambatnya realisasi belanja modal masih menjadi persoalan klasik yang berulang setiap tahun. Padahal dari sisi teori, belanja modal menjadi representasi utama belanja yang berkualitas dalam menciptakan dampak investasi dan pembangunan secara nasional (Haryanto, 2015). Oleh karena itu, realisasi dana perimbangan, dana otsus dan belanja modal setidaknya baru akan diketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Adanya *time lag* atau kesenjangan waktu antara pengukuran variabel dependen dengan variabel independen dan variabel interveningnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap model penelitiannya.

Dengan menggunakan *lag* 1 tahun, model regresi substruktur II nya menjadi sebagai berikut:

$$PE_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 DPR_{i,t-1} + \alpha_2 DOK_{i,t-1} + \alpha_3 BM_{i,t-1} + \alpha_4$$

Dimana :

$PE_{i,t}$ = Tingkat PDRB riil pada kabupaten/kota i dan tahun t

- $DPR_{i,t-1}$ = dana perimbangan pada kabupaten/kota i dan tahun t-1
 $DOK_{i,t-1}$ = dana otsus pada kabupaten/kota i dan tahun t-1
 $BM_{i,t-1}$ = belanja modal pada kabupaten/kota i dan tahun t-1
 α = konstanta regresi
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi
 $\epsilon_{i,t}$ = error term

Dengan cara yang sama, model regresi menggunakan *lag* 2 tahun menjadi sebagai berikut:

$$PE_{i,t} = \alpha + \beta_1 DPR_{i,t-2} + \beta_2 DOK_{i,t-2} + \beta_3 BM_{i,t-2} + \epsilon_{i,t}$$

Dimana :

- $PE_{i,t}$ = Tingkat PDRB riil pada kabupaten/kota i dan tahun t
 $DPR_{i,t-2}$ = dana perimbangan pada kabupaten/kota i dan tahun t-2
 $DOK_{i,t-2}$ = dana otsus pada kabupaten/kota i dan tahun t-2
 $BM_{i,t-2}$ = belanja modal pada kabupaten/kota i dan tahun t-2
 α = konstanta regresi
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

3.5 Definisi Operasioanl dan Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu.

Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus:

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk periode tahun t atau dengan *range* waktu tahun 2011 – 2015. Data disajikan dalam Lampiran 1.

3.5.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana perimbangan dan dana otsus. Data disajikan dalam Lampiran 2.

3.5.2.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan direpresentasikan dengan rasio realisasi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah.

$$DPR = \frac{\textit{Realisasi Dana Perimbangan}}{\textit{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.5.2.2 Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat untuk mendukung Daerah Otonomi Khusus yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,

pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon dana alokasi umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon dana alokasi umum Nasional.

Dana otonomi khusus dalam penelitian ini direpresentasikan dengan rasio realisasi dana otsus terhadap total anggaran dana otsus.

$$DOK = \frac{\text{Realisasi Dana Otsus}}{\text{Total Anggaran Dana Otsus}} \times 100\%$$

3.5.3 Variabel Intervening (Mediasi)

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja modal dalam penelitian ini direpresentasikan dengan rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. (Data disajikan dalam Lampiran 2).

$$BM = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.6 Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode analisis data dari hal-hal yang berhubungan dengan angka, dan menggunakan rumus-rumus serta teknik perhitungan yang digunakan untuk

menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti. Data diolah dengan bantuan *software* statistik *Eviews* versi 8.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang paling baik, dilakukan beberapa tahap prosedur pengolahan data. Data panel menggunakan data yang lebih kompleks dengan jumlah observasi yang rata-rata lebih banyak dibanding *cross section* dan *time series* sehingga diperlukan teknik khusus dalam melakukan pengolahan. Prosedur-prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Estimasi regresi data panel dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*;
2. Uji signifikansi model *common*, *fixed* dan *random effect*;
3. Menentukan model terbaik terhadap data observasi yang dimiliki;
4. Melakukan uji asumsi klasik (untuk model *common* dan *fixed effect*)
5. Uji statistik dengan regresi, uji t-Parsial dan uji F-Simultan;
6. Uji hipotesis mediasi.

3.6.1 Pendekatan Model Regresi Data Panel

Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950. Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek (misalnya harga saham, kurs mata uang, atau tingkat inflasi), tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, tahunan, dan sebagainya). Data silang terdiri atas beberapa atau

banyak objek, sering disebut responden, (misal perusahaan) dengan beberapa jenis data (misal laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi).

Dalam pembahasan teknik estimasi model regresi data panel, ada tiga teknik yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) Model *Common effect*
- 2) Model *Fixed effect*
- 3) Model *Random effect*

Common Effect Model merupakan model sederhana yaitu menggabungkan seluruh data *time series* dengan *cross section*, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*). Model ini menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk setiap obyek observasi. Dengan kata lain, hasil regresi ini dianggap berlaku untuk semua kabupaten/kota pada semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidakseuaian model dengan keadaan sebenarnya. Kondisi tiap obyek dapat berbeda dan kondisi suatu obyek satu waktu dengan waktu yang lain dapat berbeda.

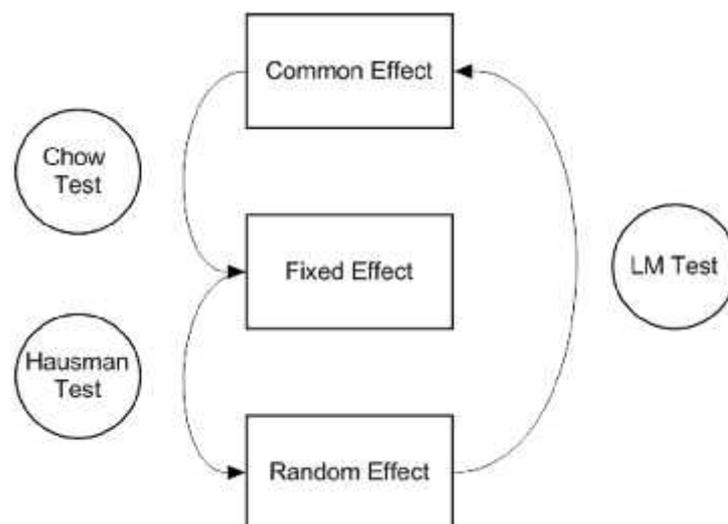
Fixed Effect Model, salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit (*cross section*) maupun antarwaktu (*time series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Random Effect Model, digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek tetap yang menggunakan *dummy variable*, sehingga model mengalami ketidakpastian. Penggunaan *dummy variable* akan mengurangi derajat bebas (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. *Random Effect Model* menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu, sehingga *Random Effect Model* mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel acak.

3.6.2 Pemilihan Model

Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji untuk memilih metode mana yang terbaik diantara ketiga metode tersebut antara lain dilakukan dengan uji Chow, uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara metode *common effect* dan *fixed effect*, sedangkan uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*, dan Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk memilih antara model OLS dan model *random effect*. Pengujian tersebut dilakukan dengan *Eviews8*.

Gambar 3.1 Pengujian Pemilihan Model Pengolahan Data Panel



a. Uji Chow

Dalam melakukan uji Chow, data diregresikan dengan menggunakan *common effect* dan *fixed effect* terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji.

Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Ho: metode *common effect*

Ha: metode *fixed effects*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *probability F* $\geq 0,05$ artinya Ho diterima; maka model yang dipilih adalah model *common effect*.
2. Jika nilai *probability F* $< 0,05$ artinya Ho ditolak; maka modal yang dipilih adalah model *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji *Hausman* untuk memilih apakah menggunakan metode *fixed effect* atau metode *random effect*.

Namun, uji Hausman tidak perlu dilakukan apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa Ho diterima, atau dengan kata lain menyimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam persamaan regresi adalah model *common effect*.

b. Uji Hausman

Selanjutnya untuk melakukan *Hausman Test*, data juga diregresikan dengan metode *random effect*, kemudian dibandingkan antara *fixed effect* dan *random effect* dengan membuat hipotesis:

Ho: Model *Random effect*

Ha: Model *fixed effect*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah sebagai berikut:

1. Jika Nilai *probability Chi-Square* $\geq 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya model *random effect*.
2. Jika Nilai *probability Chi-Square* $< 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya model *fixed effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect*. Uji Signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh *Breusch-Pagan*. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Model mengikuti *common effect*

H_a : Model mengikuti *random effect*

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*. Atau dapat dilakukan dengan melihat nilai *probability Cross-section random*. Apabila nilainya berada di atas 0,05 atau tidak signifikan, maka H_0 diterima dan jika berada dibawah 0,05 atau signifikan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.7 Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian berupa variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Perimbangan, dana otsus, belanja Modal dan PDRB. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi. *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

Regresi data panel memberikan alternatif model yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect Model*. Model *Common Effect* dan *Fixed Effect* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan *Random Effect* menggunakan *Generalized Least Squares* (GLS) sebagai teknik estimasinya.

Menurut Gujarati & Porter (2009), persamaan yang memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Dalam *Eviews*, model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya *random effect model*, sedangkan *fixed effect* dan *common effect* menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini tergantung pada hasil pemilihan metode estimasi. Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi yang sesuai untuk persamaan regresi adalah *random effect*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan *common effect* atau *fixed effect* (OLS) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam software *Eviews*, normalitas sebuah data dapat diketahui salah satunya dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB) dan nilai *Chi Square* tabel. Uji JB didapat dari *histogram normality*.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H₀ : Data berdistribusi normal

H₁ : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari JB hitung > *Chi Square* tabel, maka H₀ ditolak. Sedangkan jika hasil dari JB hitung < *Chi Square* tabel, maka H₀ diterima.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan cara:

1. Korelasi antar variabel (*pairwise correlations*) dimana apabila kurang dari 0,8 maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila hubungan variabel diatas 0,8 maka terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2004).
2. Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2004).

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Salah satu uji statistik yang lazim dipergunakan untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisits pada suatu model adalah uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan, menurut waktu (*data time series*) atau ruang (*data cross section*). Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson* (D-W) untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model dengan ketentuan sebagai berikut (dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5%):

1. DW bernilai dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif
2. DW berada diantara -2 dan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi
3. DW bernilai diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif

3.8 Analisis Regresi (Uji Hipotesis)

Setelah pemilihan model, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi. Analisis regresi memiliki tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan variabel bebas yang diketahui. Selain itu, analisis regresi juga berfungsi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta menunjukkan arah hubungan tersebut.

Analisis regresi dengan Uji Statistika F dan Uji Statistika t berguna untuk menguji tingkat signifikansi. Semakin tinggi tingkat signifikansi, semakin cukup bukti

untuk menyatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat.

3.8.1 Uji Statistika F – Simultan

Uji F dikenal dengan Uji simultan atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.8.2 Uji Statistika t - Parsial

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau koefisien bernilai negatif maka hipotesis alternatif ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% dan koefisien bernilai positif maka hipotesis alternatif diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.8.3 Uji Variabel Mediasi

Analisis variabel mediasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode *causal step* berdasarkan ketentuan dari Baron dan Kenny (1986) yaitu dengan metode perbedaan koefisien yang menggunakan pemeriksaan dengan melakukan analisis dengan dan tanpa melibatkan variabel mediasi.

Metode pemeriksaan variabel mediasi dengan pendekatan perbedaan koefisien dilakukan sebagai berikut: (1) memeriksa pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen pada model dengan melibatkan variabel mediasi (2) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model tanpa melibatkan variabel mediasi, (3) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, (4) memeriksa pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen.

Jika (3) dan (4) signifikan, serta (1) tidak signifikan, maka belanja modal merupakan variabel mediasi sempurna (*complete mediation*). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) lebih kecil (turun) dari (2) maka belanja modal dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (*partial mediation*). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) hampir sama dengan (2) maka belanja modal dikatakan bukan sebagai variabel mediasi. Jika salah satu (3) atau (4) atau keduanya tidak signifikan maka belanja modal bukan sebagai variabel mediasi (Solimun, 2011; Hair et al., 2010).

3.8.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai R^2 berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai satu maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap variasi variabel terikat. Jika R^2 mendekati nol (0) maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerimaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota di wilayah provinsi Aceh dengan tahun amatan 2011 sampai 2015. Berdasarkan hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Sementara dana otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- b. Dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di satu dan dua tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan realisasi dana perimbangan melalui belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal akan secara langsung menambah tingkat daya beli masyarakat di tahun yang sama yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- c. Dana otsus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh pada tahun yang bersangkutan ataupun satu tahun setelahnya, namun baru memiliki pengaruh signifikan positif dua tahun setelah dana otsus

direalisasikan. Hal ini diduga dikarenakan realisasi dana otsus banyak menumpuk diakhir tahun, sehingga dampaknya tidak langsung dilihat di tahun berjalan. Selain itu juga adanya proyek atau kegiatan dari dana otsus yang bersifat tahun jamak (*multi years*).

- d. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga disebabkan karena porsi belanja modal pemerintah yang tidak terlalu besar, di mana sebagian besar belanja pemerintah dialokasikan untuk belanja pegawai.
- e. Belanja modal tidak memediasi hubungan antara penerimaan dana dari Pusat yaitu dana perimbangan dan dana otsus dengan pertumbuhan ekonomi Aceh dikarenakan rata-rata belanja modal kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh 2011-2015 hanya sebesar 21%. Rendahnya porsi alokasi belanja modal disebabkan tingginya porsi belanja pegawai. Inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab variabel belanja modal tidak mampu menjadi mesin penggerak menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal meskipun nilai pendapatan daerah dari Pusat berupa dana perimbangan dan dana otsus yang diterima cukup besar bahkan dengan jumlah yang meningkat setiap tahunnya.

5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap peningkatan

efektivitas pengelolaan dana-dana transfer dari Pusat dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

a. Implikasi Teoritis

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sesuai teori *Fiscal Federalism* dan teori desentralisasi, pendelegasian wewenang dari Pusat kepada daerah (yang salah satunya dilakukan dalam bentuk transfer dana untuk membiayai kebutuhan daerah) akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku pemerintah daerah. Pengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya ditentukan oleh seberapa efektif kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam mengelola dana-dana yang diterima dari pusat untuk memaksimalkan pelayanan publik di daerahnya masing-masing terutama dalam mengalokasikan dananya untuk porsi belanja modal.

b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada kebijakan khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk meningkatkan porsi belanja modal dalam anggaran belanja daerahnya sehingga diharapkan dana-dana transfer dari Pusat (dana perimbangan dan otsus) dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dan berusaha untuk menekan rasio belanja pegawainya dengan melakukan moratorium pegawai daerah serta meningkatkan kualitas pegawai yang ada sehingga dapat memberikan kinerja yang baik bagi pelayanan publik di daerah. Selain itu, bagi pemerintah Provinsi agar menyusun aturan/kebijakan pengelolaan dana otsus yang efektif sehingga diharapkan dana otsus yang diterima kabupaten/kota dapat direalisasikan untuk

pembangunan secara optimal. Dan, bagi aparat pengawasan pemerintah daerah (BPKP dan Inspektorat) diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasannya dalam pengelolaan dana daerah sejak proses penganggaran hingga selesai direalisasikan agar dana yang tersedia tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, terhindar dari penyimpangan/penyalahgunaan dan memberikan hasil yang maksimal terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh dana perimbangan, dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut:

- a. Komponen APBD berupa penerimaan dana transfer dari Pusat dalam penelitian ini hanya terbatas pada dana perimbangan dan dana otonomi khusus.
- b. Penelitian ini hanya mengambil belanja modal sebagai variabel mediasi. Dan variabel dependen hanya pertumbuhan ekonomi. Dapat dikembangkan variabel dependen dengan tingkat pendidikan/kesehatan.
- c. Objek penelitian terbatas pada kabupaten/kota di provinsi Aceh dan rentang waktu hanya 5 (lima) tahun.

5.4 Saran

- a. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang berasal dari komponen APBD seperti PAD dan dana penyesuaian, serta mem-*breakdown* komponen dana perimbangan yang terdiri dari DBH migas, DBH non migas, DAU dan DAK sehingga diharapkan dapat memberikan model penelitian yang lebih baik;
- b. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba alternatif variabel mediasi selain belanja modal seperti belanja pegawai dan/atau penyertaan modal (investasi pemerintah daerah);
- c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel wilayah yang diteliti dengan penggunaan data sekunder yang lebih besar dan perpanjangan rentang tahun pengamatan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- . 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah, Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera barat : 2000-2006*. Depok: Universitas Indonesia.
- Arsa, I Ketut. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013*. Bali: Universitas Udayana.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2016. *Berita resmi statistik: Profil Kemiskinan Di Provinsi Aceh Maret 2016*. No. 32/07/TH.XIX, 18 Juli 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali 2010-2014*. Katalog BPS: 7203005.51.
- Bank Indonesia. 2017. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh : Kajian Triwulan IV-2016*. Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan - Tim Ekonomi Moneter. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- Baron, R.M. and Kenny, D.A. 1986. *The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations*. Journal of personality and social psychology, 51(6), p.1173.
- BPKP. 2011. *Misteri Penyerapan Anggaran*. BPKP D.I. Yogyakarta Paris Review, Edisi Desember 2011.
- Davoodi, H. and Zou, H.F. 1998. *Fiscal decentralization and economic growth: A cross-country study*. Journal of Urban economics, 43(2), pp.244-257.

- Debnath, Avijit., dkk. 2013. *Transfer Dependence of Northeast States: Are the Growth Effects of Grants Uniform Across States?.* The Journal of Applied Economic Research, Vol. 7, No.1, pp 117–130.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pelengkap Buku Pegangan 2014: Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati dan Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika.* Salemba Empat. Jakarta.
- Gunalp, Burak, and Timur Han Gur. 2002. *Government Expenditures and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from a Panel Data Analysis.* METU Studies in Development 29:3-4. 311-332.
- Hartati, C.S., Abdullah, S., Muliasaputra. 2016. *Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh.* Jurnal Magister Akuntansi ISSN, 2302, p.0164.
- Haryanto, Joko Tri, dan Ester Sri Astuti. 2009. *Desentralisasi fiskal dan penciptaan stabilitas keuangan daerah.* Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 13, no. 1. Badan Kebijakan Fiskal. Departemen Keuangan RI.
- Haryanto, J.T. 2015. *Perbaiki Kualitas Belanja 2015.* Kementerian Keuangan RI. <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/perbaikikualitas-belanja-2015>. Diakses 5 Juni 2017.
- Hayek, F.A. 1945. *“The Use of Knowledge in Society,”* American Economic Review 35: 519–30.
- Hendriwiyanto, Guntur. 2014. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi.* Malang: Universitas Brawijaya.
- Hong, H. and Ahmed, S. 2009. *Government Spending On Public Goods: Evidence On Growth And Poverty.* Economic and Political Weekly, pp.102-108.
- Iskandar, Maolana Amin. 2012. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010).* Depok: Universitas Indonesia.

- Julitawati, E. and Darwanis, J. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Akutansi ISSN, 2302, p.0164.
- Ma, Jun. 1997. *Intergovernmental Fiscal Transfer: A Comparison of Nine Countries: (cases of the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India, and Indonesia)*. World bank.
- Munnell, A.H. 1992. *Policy Watch Infrastructure Investment and Economic Growth*. The Journal of Economic Perspectives, 6(4), pp.189-198.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oates, W.E. 1999. *An essay on fiscal federalism*. Journal of economic literature, 37(3), pp.1120-1149.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
- . 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh*
- . 2004a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- . 2004b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- . 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh*.
- . 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . 2008a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- . 2008b. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2009*.
- . 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- . 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- . 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.*
- . 2008. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009*
- Rondinelli, D.A., Nellis, J.R. and Cheema, G.S. 1983. *Decentralization in developing countries.* world bank staff working paper, 581.
- Santosa, Budi. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia.* Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan, 5(2), pp.130-143.
- Setiyawati, A. and Hamzah, A., 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4(2), pp.211-228.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Taaha, Yulian Rinawaty, Nursini dan Agussalim. 2010. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah.* Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Wandira, A.G. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.* Accounting Analysis Journal, 2(1).
- Wertianti, I.G dan A.A.N.B Dwirandra. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Moderasi.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(3), pp.567-584.